

Pemerintah Batal Beri Diskon Tarif

Dari Halaman 1

Pemerintah rencananya menggelontorkan diskon pada Juni dan Juli tahun ini. Tapi karena diskon listrik mekanisme penganggarannya lebih lambat, rencananya dibatalkan.

"Kita rapat diskon listrik penganggaran lebih lambat. Kalau Juni, Juli tidak bisa dijalankan," katanya.

Presiden Prabowo Subianto akan memberikan 6 bantuan atau insentif pada 5 Juni 2025 mendatang untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tetap dijaga di level 5 persen.

Rencana gelontoran bantuan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai memimpin rapat dengan sejumlah stakeholder terkait.

Salah satu bantuan berbentuk diskon tarif listrik sebanyak 50 persen dari tarif normal. Diskon tarif diberlakukan untuk tagihan Juni dan Juli.

Kejagung Geledah Apartemen

Dari Halaman 1

Harli Siregar menyebut pengeledahan dilakukan di Apartemen milik Stafsus Nadiem bernama Ibrahim yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan, pada Jumat (23/5).

"Diketahui bahwa Ibrahim adalah Stafsus Nadiem sekaligus tim teknis," ujarnya kepada wartawan, Senin (2/6).

Dalam pengeledahan itu, Harli menyebut penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus turut menyita sejumlah barang

17 Juta Buruh Akan Dapat Bantuan Rp600 Ribu.....

Dari Halaman 1

bulan, diberikan untuk bulan Juni dan Juli. Jadi, dua bulan Rp600," kata Menteri Keuangan Sri Mulyai pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6).

Sri Mulyani menerangkan BSU itu diberikan untuk pekerja dan guru honorer. Penerima bantuan terdiri dari 17,3 juta orang pegawai dan

KPK Kembali Panggil Mantan Dirjen

Dari Halaman 1

dan PKK Kemenaker pada tahun 2020-2023.

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Akan tetapi, mereka belum membuka latar belakang para tersangka.

Selain itu, KPK telah menyita 13 kendaraan yang terdiri atas 11 unit mobil dan dua unit motor dari pengeledahan selama 20-23 Mei 2025.

Sebelumnya, Menaker Yassierli mengatakan ada dua pensiunan Kemnaker yang terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA). Mereka sudah ditetapkan

Mendikdasmen Respons Putusan MK

Dari Halaman 1

Mu'ti memastikan putusan MK terkait pendidikan dasar tersebut akan dilaksanakan oleh pemerintah. Hanya saja, ia menyebut penerapannya tidak bisa dilakukan terburu-buru karena ada skema pembiayaan yang harus diatur oleh negara.

Oleh sebab itu, Mu'ti menyebut pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan karena diyakini akan ada perubahan postur APBN.

"Terkait dengan pelaksanaannya kami harus koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan juga harus menunggu arahan dari Presiden," ujarnya.

"Itu kan (anggaran) berarti harus perubahan di tengah tahun kan berarti harus ada pembicaraan dengan Menteri Keuangan dan DPR," imbuhnya.

Sebelumnya MK mengabulkan gugatan uji materiil atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. MK memerintahkan agar pendidikan dasar di swasta tidak memungut biaya.

Majelis hakim konstitusi menyatakan pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas itu bertentangan

KPK Panggil Eks

Dari Halaman 1

perusahaan (corporate social responsibility/CSR) BI.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama EH sebagai mantan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Senin (2/6).

Harus Disingkirkan Karena Bebani Rakyat

Dari Halaman 1

yang tidak kompeten.

Menurut Toha, seluruh pejabat harus bekerja dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan tunduk pada dasar negara, yakni Pancasila.

Tidak hanya itu, Toha juga menekankan bahwa seluruh pejabat yang dipilih pemerintah maupun rakyat harus bekerja berlandaskan UUD NRI Tahun 1945.

"Tidak boleh ada pejabat yang justru mengkhianati nilai-nilai dasar negara dan aturan hu-

Tapi diskon tarif tak diberikan untuk semua pelanggan. Diskon hanya diberikan pada pelanggan listrik berdaya 1.300 VA.

Ada 79,3 juta rumah tangga yang menjadi sasaran bantuan ini.

"Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua (2025). Jadi, momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi," tuturnya dalam rilis resmi, Sabtu (24/5).

Selain itu, berikut 5 bantuan lainnya

1. Diskon transportasi
2. Potongan tarif tol
3. Tambahan alokasi bantuan sosial
4. Bantuan subsidi upah (BSU)
5. Perpanjangan program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi buruh di sektor padat karya.

Bantuan ini dianggap sebagai langkah krusial untuk mengerek konsumsi masyarakat. Mengingat, ekonomi Indonesia di kuartal lalu cuma mampu tumbuh 4,87 persen.**(cnni/js)**

bukti elektronik seperti handphone dan laptop.

"Barang bukti itu sedang dialami penyidik," ujar Harli.

Sebelumnya Kejagung telah mengeledah dua apartemen milik staf khusus Nadiem Makarim, di Apartemen Kuningan Place milik Fiona Handayani dan di Apartemen Ciputra World 2 milik Juris Stan pada Rabu (21/5).

Dalam kasus ini, Kejagung mengaku menemukan indikasi adanya pemufakatan jahat melalui pengarahannya agar tim teknis membuat kajian pengadaan alat TIK berupa laptop dengan dalih teknologi pendidikan.

565 ribu orang guru honorer.

Pemberian BSU akan dilakukan satu kali atau dirapel. Pemerintah berupaya mencairkan bantuan subsidi upah itu bulan ini.

Sri Mulyani mengungkapkan alasan Prabowo menambah jumlah BSU. Menurutny, hal ini berkaitan dengan pembatalan diskon tarif listrik yang sebelumnya telah diumumkan.

"Diskon listrik penganggaran lebih lambat kalau Juni-Juli, tidak bisa dijalankan sehingga

sebagai tersangka.

Menurutnya, pengeledahan di Kantor beberapa waktu lama terkait kasus yang sudah lama terjadi yakni 2020-2023. Beberapa pejabat yang terlibat pun sudah dipecat sejak awal tahun lalu.

"Kita copot ada sekian orang dari Februari sampai Maret (2025), soal nama adalah domain KPK. Kemudian disampaikan tersangka itu 2 orang pensiunan," ujarnya usai membuka Job Fair 2025 di Kantor Kemnaker, Kamis (22/5).**(cnni/js)**

dengan konstitusi selama tidak dimaknai, 'Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat'.

Dalam pertimbangannya, hakim Enny Nurbaningsih menyampaikan pemohon mendalikan frasa 'wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya' di Pasal 34 ayat 2 UU 20/2003 menimbulkan multitafsir dan perlakuan diskriminatif.

MK pun mengubah norma frasa tersebut menjadi, "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat."

Di sisi lain putusan MK tersebut tidak melarang sekolah atau madrasah swasta tertentu untuk memungut biaya dari peserta didik.

Sekolah swasta tertentu yang dimaksud MK, antara lain, sekolah swasta yang menawarkan kurikulum tambahan selain kurikulum nasional

3. Tambahan alokasi bantuan sosial

Tambahan berupa kartu sembako dan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

4. Bantuan subsidi upah (BSU)

Bantuan seperti yang pernah disalurkan pada masa pandemi covid-19. Ini berlaku untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.

"Pemberian (bantuan) subsidi upah seperti (masa) covid. Besarannya lebih kecil (dari Rp600 ribu)," beber sang menko.

Pada 2022 lalu, BSU yang diberikan adalah Rp600 ribu untuk para buruh yang memenuhi syarat. Bantuan ini dibagikan satu kali saja kepada para penerima.

5. Perpanjangan program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi buruh di sektor padat karya.

Bantuan ini dianggap sebagai langkah krusial untuk mengerek konsumsi masyarakat. Mengingat, ekonomi Indonesia di kuartal lalu cuma mampu tumbuh 4,87 persen.**(cnni/js)**

Melalui kajian itu, ia mengatakan dibuat skenario seolah-olah dibutuhkan penggunaan laptop dengan basis sistem Chrome yakni Chromebook. Padahal, kata dia, hasil uji coba yang dilakukan pada tahun 2019 telah menunjukkan bahwa penggunaan 1.000 unit Chromebook tidaklah efektif sebagai sarana pembelajaran.

Sebanyak 28 orang saksi juga telah diperiksa terkait proyek yang memakan anggaran Rp9,9 triliun itu. Dua diantaranya adalah staf khusus mantan Mendikbud Nadiem Makarim, yakni Fiona Handayani dan Juris Stan.**(cnni/js)**

diganti bantuan subsidi upah," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan enam kebijakan stimulus ekonomi. Paket kebijakan itu diharapkan bisa mendorong perekonomian Indonesia.

Rapat di istana hari ini membahas kembali paket kebijakan tersebut. Hasilnya paket kebijakan dirampingkan menjadi lima program dengan total anggaran Rp24,44 triliun.**(cnni/js)**

Eks PM Israel Cap

Dari Halaman 1

jumlah warga Palestina yang tewas terus meningkat.

"Apa lagi kalau bukan kejahatan perang?" tanya Olmert saat wawancara dengan CNN, Kamis (28/5).

Dia lalu menyebut Netanyahu dan anggota sayap kanan pemerintahannya "melakukan tindakan yang tak bisa ditafsirkan dengan cara lain."

Sebetulnya sejak Israel melancarkan agresi ke Palestina, Olmert kerap membela negara itu dari tuduhan genosida dan kejahatan perang. Dia bahkan meyakini Israel tidak akan secara sengaja membunuh perempuan dan anak-anak.

Namun setelah 19 bulan perang, Olmert meruntuhkan argumen yang selama ini diyakini. Dia juga menulis kolom yang dirilis di Haaretz pada pekan lalu.

"Apa yang kita lakukan di Gaza sekarang adalah perang yang menghancurkan; pembunuhan warga sipil tanpa pandang bulu, tanpa batas, kejam, dan kriminal," ungkap Olmert.

Sejak agresi Israel, lebih dari 54.000 warga Palestina tewas. Dari jumlah tersebut, 28.000 korban adalah perempuan dan anak-anak. Pada Januari, Israel mengklaim telah menewaskan lebih dari 20.000 pejuang Hamas.

"Saya pikir kita harus memastikan tak ada orang yang tak terlibat di Gaza karena perluasan operasi militer, yang sama sekali tak dibenarkan dan tidak melayani kepentingan penting negara Israel saat ini," ungkap Olmert.

Sebagian besar kritik eks PM itu ditujukan untuk Netanyahu, menteri sayap kanan Itamar Ben Gvir, dan Bezalel Smotrich.

"Saya berharap pemerintahan ini akan segera lenyap. Saya yakin mayoritas warga Israel sudah muak dengan kebijakan ini," tulis Olmert.**(cnni/js)**



Diskon Listrik Tak Menyala

Dari Halaman 1

terburu-buru, inkonsistensi program sosial, dan kurangnya sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat rentan. Ini menjadi preseden buruk bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Diskon listrik 50 persen sebenarnya menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menjadi mayoritas pelanggan PLN. Bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA—yang notabene adalah keluarga prasejahtera—potongan tagihan bisa berarti tambahan belanja dapur atau ongkos sekolah anak.

Namun, ketika harapan itu mulai tumbuh, pemerintah justru mencabutnya dengan alasan yang tidak memuaskan. Bagaimana mungkin kebijakan yang menyasar puluhan juta rakyat diumumkan tanpa kepastian soal penganggaran? Ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara perumus kebijakan dan pengelola fiskal negara.

Lebih dari itu, batalnya program ini mencerminkan betapa seringnya rakyat kecil menjadi korban tarik-ulur agenda elite. Ketika bantuan sosial menjadi alat pencitraan, bukan bentuk keberpihakan nyata, maka yang tersisa hanya kebingungan dan kekecewaan publik.

Sebagai pengganti, pemerintah meluncurkan kembali program Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600.000 untuk dua bulan. Sasaran program ini adalah 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dan lebih dari 500 ribu guru honorer. Meski bantuan tunai ini penting, sifatnya tetap jangka pendek dan tidak merata.

Pertanyaannya, apakah program ini setara dampaknya dengan diskon listrik yang telah direncanakan? Tentu tidak. Diskon tarif listrik menyentuh konsumsi dasar yang rutin, bukan bantuan satu kali yang cepat habis.

Selain itu, penerima BSU jauh lebih sedikit dibanding pelanggan rumah tangga miskin penerima subsidi listrik. Artinya, ada potensi eksklusi yang cukup besar.

Ironisnya, alasan pembatalan justru berakar pada hal teknis—sebuah hal yang semestinya bisa diantisipasi jauh hari. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Keuangan semestinya memiliki mekanisme perencanaan dan eksekusi yang matang, bukan memberi janji dulu baru berpikir soal anggaran.

Kasus diskon listrik ini membuka tabir lemahnya konsistensi dalam kebijakan pro-rakyat. Dalam beberapa tahun terakhir, subsidi energi memang menjadi perdebatan antara efisiensi fiskal dan keadilan sosial. Namun ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan biaya hidup yang tinggi, kehadiran negara dalam bentuk subsidi bukanlah pilihan, melainkan kewajiban.

Energi listrik bukan lagi kebutuhan sekunder. Ia telah menjadi prasyarat untuk pendidikan digital, usaha mikro, layanan kesehatan mandiri, dan kehidupan rumah tangga. Mengurangi beban listrik berarti mendorong ketahanan keluarga. Maka, pembatalan bantuan listrik di tengah ekonomi yang masih rapuh sama saja dengan menarik kembali jaring pengaman sosial yang sangat dibutuhkan.

Yang paling mengkhawatirkan dari insiden ini adalah turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika janji sosial yang menyentuh hajat hidup rakyat kecil gagal direalisasikan tanpa penjelasan memadai, maka rakyat bisa makin skeptis terhadap program-program berikutnya. Bahkan bantuan sosial yang sah dan berjalan baik pun akan dipandang sinis.

Di era keterbukaan informasi dan maraknya media sosial, citra pemerintah sangat dipengaruhi oleh seberapa konsisten mereka menjalankan janji. Tidak cukup hanya membuat kebijakan populis—yang lebih penting adalah memastikan realisasinya tepat, transparan, dan komunikatif.

Pemerintah harus belajar dari kesalahan ini. Perencanaan kebijakan publik, apalagi yang menyangkut subsidi dan bantuan sosial, tidak bisa dikerjakan secara reaktif. Diperlukan mekanisme lintas kementerian yang kuat, dengan tenggat waktu yang jelas, dan sistem penganggaran yang adaptif namun tetap akuntabel.

Jika diskon listrik batal, semestinya pemerintah mempercepat alternatif program jangka menengah yang menyentuh kebutuhan dasar. Salah satunya adalah memperluas subsidi energi untuk UMKM dan keluarga rentan, bukan hanya bantuan tunai sesaat. Pemerintah juga bisa mendorong inovasi energi mandiri berbasis desa, seperti panel surya rumah tangga dengan skema gotong royong.

Transparansi komunikasi juga sangat penting. Kementerian terkait perlu menjelaskan secara terbuka: bagaimana proses pembatalan berlangsung, apa dasar keputusannya, dan bagaimana evaluasi ke depan. Rakyat tidak sekadar butuh bantuan, tetapi kejelasan.